

**EVALUASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN PROGRAM KELUARGA
BERENCANA DI PROVINSI SULAWESI UTARA
(Studi di BKKBN Prov. Sulawesi Utara)**

**ISRAEL SAMUEL THEODORUS MANDAS
FLORENCE DEISY JETTY LENGKONG
JOORIE RURU**

samuelmandas@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini diangkat berdasarkan masalah yang ditemui yaitu: distribusi alat dan obat kontrasepsi kurang lancar, terbatasnya kemampuan pengelola di kab/kota, tenaga petugas lapangan keluarga berencana menurun sehingga pemakaian alat kontrasepsi terus mengalami penurunan untuk itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan Evaluasi Kebijakan kependudukan program keluarga berencana berdasarkan kriteria evaluasi seperti Efektivitas, Efisien, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan ketepatan adapun objek penelitiannya di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Utara. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan data primer. Sementara teknik analisis dengan cara, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil Kajian menunjukkan bahwa kebijakan kependudukan telah terlaksana dengan baik terbukti dari indikator efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan dan ketepatan sedangkan pada indikator responsivitas masih kurang baik. Efektivitas sudah baik karena terbukti dengan telah berhasilnya menekan laju pertumbuhan penduduk lewat penggunaan alat dan obat kontrasepsi (Alkon), efisiensi sudah baik karena biaya untuk mengikuti program KB yang dibayarkan sebanding dengan pelayanan yang diberikan dan sesuai dengan yang telah ditetapkan, kecukupan sudah cukup membantu pemerintah karena banyak program keluarga berencana yang dikeluarkan untuk mengatasi serta mengurangi permasalahan kependudukan yang terjadi di lapangan, pemerataan sudah baik karena program KB sudah di ikuti oleh semua kalangan baik yang ada di perkotaan maupun yang ada di pedesaan lewat program kampung KB, ketepatan sudah baik karena program KB sudah tepat dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk lewat penggunaan alat dan obat kontrasepsi sedangkan responsivitas masih kurang baik karena masih banyak keluhan dari masyarakat tentang alur/prosedur dalam mengikuti program KB.

Kata Kunci: Kebijakan, Evaluasi.

ABSTRACT

This study was raised based on the problems encountered, namely: the distribution of contraceptive devices and drugs is less smooth, the limited ability of managers in the district/city, family planning field staff decreased so that the use of contraceptives continued to decline for that the purpose of this research is to know and describe the Evaluation of Population Policy of family planning program based on evaluation criteria such as Effectiveness, Efficiency, Sufficiency, Equity, Responsiveness, and accuracy as research object at Population and Family Planning Agency of North Sulawesi Province. Type of research is qualitative research with data collection techniques consist of observation, interview and primary data. While analytical techniques by the way, data reduction, data presentation, conclusion. The result of the study shows that the population policy has been implemented well proven from the indicators of effectiveness, efficiency, adequacy, equity and accuracy while the indicators of responsiveness are still not good. Effectiveness is good because it is proven by the success of suppressing the rate of population growth through the use of contraceptive devices and drugs (Alkon), efficiency is good because the cost to join the family planning program is paid in proportion to the services provided and in accordance with the established, sufficiency is enough to help the government because many family planning programs are issued to overcome and reduce the problems of population that occur in the field, equity is good because the program KB is followed by all circles both in urban and rural areas through family planning program, the accuracy is good because the program KB is appropriate in controlling the rate of population growth through the use of contraceptive devices and drugs while the responsiveness is still not good because there are still many complaints from the community about the flow / procedure in participating family planning program.

Keyword: The Policy, Evaluation

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk saat ini semakin meningkat dan itu menjadi isu yang sangat populer dan mencemaskan bagi negara-negara di dunia. Di Indonesia hal ini menjadi

masalah besar dibandingkan negara lain, pertumbuhan penduduk mempengaruhi berbagai aspek kehidupan baik ekonomi maupun sosial, terutama peningkatan mutu kehidupan atau kualitas penduduk dalam sumberdaya manusia yang dibarengi

besarnya jumlah penduduk yang tidak terkontrol. Semuanya terkait penyediaan anggaran dan fasilitas kesehatan, pendidikan serta ketersediaan pangan.

Kebijakan kependudukan merupakan suatu gejala yang relatif masih mudah. Berbagai kebijakan bidang ekonomi maupun sosial merupakan alternatif dalam peningkatan tingkat kesejahteraan penduduk. Kebijakan tersebut meliputi bidang antara lain: Penyediaan lapangan kerja, kesempatan pendidikan, meningkatkan kesehatan serta usaha-usaha menambah kesejahteraan penduduk lainnya. Berbagai hal tersebut mempengaruhi penduduk baik mengenai jumlah, komposisi dan distribusi atau persebaran pertumbuhan penduduk serta ciri-ciri penduduk lainnya. Mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat kriteria evaluasi yaitu: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan (Dunn, 2003).

Kebijakan Kependudukan dengan berlandaskan pada Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga dengan menekankan selain pada kualitas penduduk juga dengan menekan kuantitas penduduk melalui program keluarga berencana yang mempunyai sasaran yang ditentukan yaitu penurunan kelahiran (fertilitas) dengan memberikan peralatan, pelayanan, dan informasi tentang kontrasepsi. Penduduk Sulawesi Utara berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara di tahun 2017 berjumlah 2.461.028 jiwa dengan luas wilayah Provinsi Sulawesi Utara 14.499 Km², dengan laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sulawesi Utara mencapai angka 1,15% per tahun (data Badan Pusat Statistik Prov. Sulut). Kebijakan Kependudukan dengan berlandaskan pada Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan pada Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan

Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga dengan menekankan selain pada kualitas penduduk juga dengan menekan kuantitas penduduk melalui program keluarga berencana yang mempunyai sasaran yang ditentukan yaitu penurunan kelahiran (fertilitas) dengan memberikan peralatan, pelayanan, dan informasi tentang kontrasepsi, melihat pada teori evaluasi kebijakan menurut Dunn (2003) dengan indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan dapat dilihat sejauh mana kebijakan kependudukan melalui program keluarga berencana ini berhasil.

Kebijakan kependudukan untuk mengatur kuantitas penduduk melalui program keluarga berencana masih menjadi hal yang di sorot oleh pemerintah. Evaluasi saat ini distribusi alat dan obat kontrasepsi kurang lancar, terbatasnya kemampuan pengelola di kab/kota, tenaga Petugas lapangan keluarga berencana menurun sehingga pemakaian alat kontrasepsi terus mengalami penurunan, sementara yang ingin memakai alat kontrasepsi tapi tidak terlayani angkanya tinggi artinya masih banyak orang-orang yang tidak terjangkau dalam penggunaan alat kontrasepsi karena ini yang membuat pertambahan penduduk masih tidak dapat di kontrol yang mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk masih tinggi dengan Angka Kelahiran atau TFR (*Total Fertility Rate*) berada pada angka 2,2 dan yang diharapkan TFR berada pada 2,1 untuk memasuki bonus demografi. Adapun program-program keluarga berencana yaitu: mengontrol pelayanan KB, monitoring kualitas pelayanan KB, penggerakan medis dan ketersediaan alkon (alat-alat dan obat kontrasepsi) di semua klinik FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) seperti puskesmas, klinik pratama, dokter praktek dan FKRTL (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan) seperti rumah sakit pemerintah maupun swasta di semua kab/kota, jaminan informasi, penguatan operasional lini lapangan, penguatan operasional KB-KS & service center, lewat program-program Keluarga Berencana ini pemakaian alat kontrasepsi di kalangan masyarakat ada peningkatan sehingga laju pertumbuhan penduduk dapat di kontrol.

Konsep Evaluasi

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai hasil suatu program atau kegiatan. Banyak batasan tentang evaluasi, secara umum dapat dikatakan bahwa evaluasi suatu proses untuk menilai/menetapkan sejauhmana tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Evaluasi adalah membandingkan antara hasil yang telah dicapai oleh suatu program dengan tujuan yang direncanakan (Notoatmodjo, 2011: 106). Sedangkan menurut Perhimpunan Ahli Kesehatan Masyarakat Amerika, evaluasi adalah suatu proses untuk menentukan nilai atau jumlah keberhasilan dan usaha pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan (Notoatmodjo, 2011: 107).

Konsep Kebijakan

Menurut Sulistio (2012:3) kebijakan publik adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah bersama aktor-aktor elit politik dalam rangka menyelesaikan permasalahan publik guna kepentingan masyarakat.

Konsep Evaluasi Kebijakan

Menurut Dunn (2003), mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat kriteria evaluasi sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

2. Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan.

3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal.

4. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik.

5. Responsivitas

Dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan.

6. Ketepatan

Dalam proses ini keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari tujuan kebijakan yang benar-benar tercapai berguna dan bernilai pada kelompok sasaran, mempunyai dampak perubahan sesuai dengan misi kebijakan tersebut.

Konsep Kependudukan

Menurut Philip M. Hauser dan Duddley Duncan (dalam Mantra, 2000), Demografi adalah ilmu yang mempelajari jumlah, persebaran, teritorial, komposisi penduduk dan perubahan serta sebab-sebabnya yang biasa timbul karena kelahiran, kematian, migrasi, dan mobilitas sosial.

Konsep Kebijakan Kependudukan

Menurut H.T. Eldrige dalam Agus Dwiyanto (1995) mendefinisikan kebijakan kependudukan sebagai keputusan legislatif, program administrasi dan berbagai usaha pemerintah lainnya yang dimaksudkan untuk merubah kecenderungan penduduk yang ada demi kepentingan kehidupan dan kesejahteraan nasional.

Konsep Keluarga Berencana

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Keluarga berencana menurut Islam adalah merencanakan jumlah keturunan semaksimal mungkin dengan tetap memperhatikan jarak kelahiran sesuai syariat

(Anton, 2008: 65). Sedangkan pengertian Keluarga Berencana secara luas ialah merencanakan keluarga atau perencanaan keluarga sehingga persoalannya bukan sekedar mengatur besarnya atau jumlah anak atau mejarangkan anak akan tetapi lebih luas dari itu semua, yaitu merencanakan dan mengatur segala aspek kehidupan keluarga supaya tercapai suatu keluarga yang bahagia (Widiyanti, 1987: 157).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif (Moleong : 2010) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai suatu kejadian tertentu. Penelitian ini bersifat memaparkan, menafsirkan dan menganalisis evaluasi kebijakan kependudukan program keluarga berencana di Provinsi Sulawesi Utara. Dalam penelitian deskriptif kualitatif data yang diperoleh berupa kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki arti lebih dari sekedar angka atau frekuensi dan diarahkan pada pendeskripsian segera rinci dan mendalam mengenai kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya dilapangan studinya (Sutopo 2002:40).

Informan dalam penelitian ini diambil dari berbagai unsur yang mengevaluasi kebijakan. Jumlah informan yang diwawancara dalam penelitian ini sebanyak 4 orang. instrument utama dalam penelitian ini ialah peneliti sendiri, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah Wawancara; Observasi; Dokumentasi

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis interaktif yaitu teknik analisis data kualitatif yang terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi yang terjadi secara bersama (Miles dan Huberman dalam Sutopo : 2002

HASIL PEMBAHASAN

Pembahasan pada penyajian data merupakan analisis dan fakta yang peneliti temukan dilapangan serta disesuaikan dengan teori yang digunakan. Peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut William Dunn

dimana kebijakan publik merupakan suatu proses yang menggambarkan berdasarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsifitas, dan ketepatan. Sebagaimana telah dibahas pada bagian awal bahwa yang dimaksud dengan program keluarga berencana yang mempunyai sasaran yang ditentukan yaitu penurunan kelahiran (fertilitas) dengan memberikan peralatan, pelayanan, dan informasi tentang kontrasepsi, maka peneliti melakukan wawancara dengan informan penelitian yang sudah ditentukan yaitu : Kepala BKKBN Prov. Sulawesi Utara 1 orang, Bidang Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi 4 orang,. Hasil wawancara dengan Informan Penelitian adalah sebagai berikut

”Dalam mengendalikan penduduk di Sulawesi Utara program Keluarga Berencana mampu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Sulawesi Utara dari tahun ke tahun lewat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan sarana prasarana yang cukup dan memadai di setiap kabupaten/kota yang ada di sulawesi utara, ini di dukung juga lewat kerja sama bersama dengan instansi-instansi terkait yaitu pemda, bappeda, SKPD KB, dinas kesehatan dan lain-lain bahkan bekerja sama dengan TNI dan Polisi ketika masuk di daerah kepulauan Pengguna alat-alat kontrasepsi saat ini berhasil dalam menekan angka kelahiran namun masih banyak yang menjadi evaluasi bagi kami untuk meningkatkan terus pelayanan supaya setiap masyarakat paham akan program KB dan mengikutinya karena laju pertumbuhan penduduk hanya dapat dicegah oleh masyarakat sendiri untuk itu peningkatan informasi tentang program keluarga berencana terus di maksimalkan kepada publik. Kendala yang dihadapi adalah terbatasnya kemampuan petugas lapangan karena kurang akan pelatihan-pelatihan di lapangan sehingga masih banyak yang ingin menggunakan KB tapi tidak terlayani dan banyak data-data pengguna KB yang masih acak atau tidak baku karena sistem pelaporan oleh petugas kami tidak melakukan pencatatan dengan benar. Upaya yang di berikan yaitu memaksimalkan pelayanan di perkotaan sampai di pelosok daerah dengan kami bekerjasama dengan SKPD di kab/kota di setiap daerah, juga melakukan pelatihan

buat petugas supaya mereka dapat bekerja sesuai dengan SOP yang sudah di tentukan.”

Saat ini dalam berjalannya program keluarga berencana memang sudah berjalan dengan baik karena sampai saat ini laju pertumbuhan penduduk lewat penggunaan alat-alat dan obat-obat kontrasepsi dapat di tekan angka kelahiran dan tentunya program keluarga berencana efektif dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Selalu berkerja sama dengan instansi-instansi yang terkait yaitu Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Negeri maupun swasta untuk berjalannya dan suksesnya program keluarga berencana ini. Program KB cukup dalam membantu pemerintah namun dalam pelaksanaannya permasalahan yang sering terjadi menyangkut SDM para tenaga medis yang harus lebih ditingkatkan terlebih dalam memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Pelayanan yang ramah, cepat dan tepat menjadi tolak ukur SOP. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan hasil program KB yaitu dengan giat melaksanakan sosialisasi serta meningkatkan publikasi untuk mengajak para masyarakat berpartisipasi dalam program ini guna mewujudkan keluarga sejahtera dan juga giat melaksanakan seminar-seminar kepada masyarakat tentang reproduksi sehat selain itu meningkatkan pula pendidikan dan pelatihan-pelatihan, untuk petugas-petugas lapangan beserta pengelola-pengelola di setiap kabupaten/ kota”

Program Keluarga Berencana dengan tujuan mengendalikan penduduk yang ada di Sulawesi Utara dengan menjaga angka kelahiran lewat penggunaan alat-alat dan obat kontrasepsi serta program-program kesehatan lainnya sudah dapat berjalan dengan baik. Kendala sendiri yang paling sering ditemui tentang sistem yang tidak baku yang tidak mengikuti alurnya dan juga pelaporan yang kacau, ini dipicu karena terlalu cepat atau asal-asalan dalam penulisan laporan dan juga PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) yang menurun, lemahnya petugas lapangan dan pengelola di kabupaten/kota. Ini diakibatkan oleh kurangnya komitmen dari petugas dalam pelaksanaan program akibatnya peserta keluarga berencana tidak terlayani dan pembinaan kepada masyarakat jadi tersendat-sendat. Oleh karena itu adapun

upaya-upaya yang terus dilakukan yaitu melakukan monitoring evaluasi, apakah semuanya sudah berjalan dengan baik, mengontrol kualitas pelayanan berdasarkan SOP untuk menjaga serta meningkatkan mutu, melakukan pendidikan dan pelatihan bagi petugas-petugas lapangan serta meningkatkan publikasi untuk menjangkau masyarakat. Bidang keluarga berencana pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang menjadi informan penelitian.

Pembahasan Hasil Penelitian

Program Keluarga Berencana dengan tujuan mengendalikan penduduk yang ada di Sulawesi Utara dengan menjaga angka kelahiran lewat penggunaan alat-alat dan obat kontrasepsi serta program-program kesehatan lainnya sudah dapat berjalan dengan baik. Kendala sendiri yang paling sering ditemui tentang sistem yang tidak baku yang tidak mengikuti alurnya dan juga pelaporan yang kacau, ini dipicu karena terlalu cepat atau asal-asalan dalam penulisan laporan dan juga PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) yang menurun, lemahnya petugas lapangan dan pengelola di kabupaten/kota. Ini diakibatkan oleh kurangnya komitmen dari petugas dalam pelaksanaan program akibatnya peserta keluarga berencana tidak terlayani dan pembinaan kepada masyarakat jadi tersendat-sendat. Oleh karena itu adapun upaya-upaya yang terus dilakukan yaitu melakukan monitoring evaluasi, apakah semuanya sudah berjalan dengan baik, mengontrol kualitas pelayanan berdasarkan SOP untuk menjaga serta meningkatkan mutu, melakukan pendidikan dan pelatihan bagi petugas-petugas lapangan serta meningkatkan publikasi untuk menjangkau masyarakat. Bidang keluarga berencana pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang menjadi informan penelitian. Setelah dirangkum, hasil penelitian kemudian akan dideskripsikan sesuai indikator evaluasi kebijakan menurut William Dunn (2003), yakni sebagai berikut :

1. Efektivitas

Efektivitas dalam kebijakan kependudukan untuk mengendalikan penduduk di Sulawesi Utara program Keluarga Berencana mampu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Sulawesi Utara dari tahun

ke tahun lewat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan sarana prasarana yang cukup dan memadai di setiap kabupaten/kota yang ada di Sulawesi utara, ini di dukung juga lewat kerja sama bersama dengan instansi-instansi terkait yaitu pemda, bappeda, SKPD KB, dinas kesehatan dan lain-lain bahkan bekerja sama dengan TNI dan Polisi ketika masuk di daerah kepulauan.

2. Efisien

Biaya dalam mengikuti program KB di rasa sebanding dengan pelayanan yang di berikan lewat fasilitas-fasilitas yang lengkap dilapangan dan Alkon (alat-alat dan obat kontrasepsi) yang berkualitas dan terjamin keamanannya. berbicara tentang efisien, anggaran yang di gunakan untuk program keluarga berencana mulai dari pembinaan keluarga, alkon dan lain-lain tidak terlalu begitu mahal.

3. Kecukupan

Dalam hal ini program keluarga berencana dinilai cukup membantu pemerintah mengatasi masalah kependudukan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi terbukti dari penggunaan alat-alat kontrasepsi yang telah berhasil dalam menekan angka kelahiran namun masih banyak yang menjadi evaluasi untuk meningkatkan terus pelayanan supaya setiap masyarakat paham akan program keluarga berencana dan mengikutinya karena laju pertumbuhan penduduk hanya dapat dicegah oleh masyarakat sendiri untuk itu peningkatan informasi tentang program keluarga berencana terus di maksimalkan kepada publik.

4. Perataan

Sampai saat ini dari semua golongan yang ada di masyarakat sudah dapat dijangkau namun untuk mengikuti program keluarga berencana masih sedikit masyarakat yang mengikutinya apalagi di daerah pedesaan yang masih tertanam dalam pikiran mereka “banyak anak, banyak rejeki” namun dengan diprogramkan kampung KB di beberapa desa sangat efektif yang saat ini sudah ada di beberapa desa di kabupaten-kabupaten yang ada di Sulawesi Utara

dan ini memiliki dampak selain mengatur jarak melahirkan dan jumlah anak per rumah tangga juga meningkatkan kualitas keluarga dengan kesehatan anak, karena dengan anak yang banyak terus tidak berkualitas ini menjadi beban untuk negara kita untuk itu pembinaan keluarga terus di lakukan.

5. Responsivitas

Adapun keluhan yang sering dikemukakan oleh masyarakat biasanya mengenai biaya pelayanan KB yang tidak sepenuhnya gratis untuk pelayanan KB bagi masyarakat miskin (KPS dan KS-I) dan juga keluhan terhadap alat dan obat kontrasepsi namun yang mereka harus sadari kegiatan pelayanan KB gratis bagi masyarakat miskin pada intinya mencakup pemberian gratis alat dan obat kontrasepsi saja bagi peserta KB dari KPS dan KS.

6. Ketepatan

Ketika keluarga-keluarga yang ada di masyarakat mengikuti KB hasilnya selain dirasakan oleh kita semua sebagai masyarakat dirasakan terlebih untuk keluarga itu sendiri karena ber-KB mencegah bukan membatasi artinya ketika menggunakan alat kontrasepsi artinya kita membuat perencanaan, pengaturan dan pertanggung-jawaban terhadap anggota keluarga.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang diuraikan sebagai berikut :

1. Efektivitas

Program keluarga berencana berjalan dengan baik terbukti dengan telah berhasilnya menekan laju pertumbuhan penduduk lewat penggunaan alat dan obat kontrasepsi (Alkon).

2. Efisiensi

Sudah baik karna biaya untuk mengikuti program keluarga berencana yang dibayarkan sebanding dengan pelayanan yang diberikan dan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

3. Kecukupan
Di rasa sudah cukup membantu pemerintah karena banyak program keluarga berencana yang dikeluarkan untuk mengatasi serta mengurangi permasalahan kependudukan yang terjadi di lapangan secara efektif dan efisien.
4. Perataan
Program keluarga berencana sudah di ikuti oleh semua kalangan baik yang ada di perkotaan maupun yang ada di pedesaan.
5. Responsivitas
Masih minim keluhan dari masyarakat tentang alur/prosedur dalam mengikuti program keluarga berencana.
6. Ketepatan
Program keluarga berencana sudah tepat dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk lewat penggunaan alat dan obat kontrasepsi.

SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan saran-saran yang dapat dilakukan diantaranya :

1. BKKBN harus lebih memaksimalkan kinerja pelayanannya dalam melaksanakan program-program keluarga berencana terlebih dalam hal penyampaian informasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengikuti program keluarga berencana lewat penggunaan alat dan obat kontrasepsi.
2. Melakukan pendidikan dan pelatihan untuk Petugas Lapangan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Meningkatkan pengawasan dalam pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi (Alkon) di semua klinik FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat

Pertama) seperti puskesmas, klinik pratama, dokter praktek dan FKRTL (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan) seperti rumah sakit pemerintah maupun swasta di semua kab/kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton, D. dan Dyah, A. 2008. *Memilih Kontrasepsi Alami dan Halal*. Solo: Aqwamedika.
- Dunn, W. N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: GMUP).
- Dwiyanto, A. 1995. *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Fisipol UGM.
- H. B. Sutopo. 2002. *Judul: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Ida B. M. 2000. *Demografi Umum*. Yogyakarta.
- Moleong, J. L. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- _____. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Notoatmodjo, S. 2011. *Kesehatan Masyarakat: Ilmu & Seni/ed. Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sulistio, E. B. 2012. *Buku Ajar Studi Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Widiyanti. 1987. *Masalah Penduduk Kini dan Mendatang*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga